

ABSTRAK

Pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku suatu tindak pidana dengan cara membatasi kebebasan fisik individu dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. Permasalahan yang terjadi pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini memiliki banyak kekurangan. Mengingat pidana denda di Indonesia masih sangat jarang di jatuhkan atau diberikan sebagai hukuman. Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah yaitu apakah pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dapat memberikan efek jera dan apakah boleh jika hakim memutuskan pidana denda sebagai alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek jika belum ada aturan yang mengaturnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek kurang efektif dalam memberikan efek jera dan dalam melaksanakan pembinaan secara tepat, Oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan membutuhkan waktu yang cukup agar metode dan program pembinaan dapat terserap dengan baik dan Dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat memutuskan pidana denda sebagai alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek walupun belum ada aturan yang mengatrunya, karena hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kata Kunci: Pidana Denda, Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek, Kekuasaan kehakiman

ABSTRACT

Short-term deprivation of liberty is a criminal sanction given to the perpetrator of a criminal act by limiting an individual's physical freedom for a period of less than 6 (six) months. The problem with this short-term criminal confiscation of limits has many shortcomings. Considering that fines in Indonesia are still very rarely imposed or given as punishment. Based on the problem above, the formulation of the problem is determined, namely whether a fine as an alternative to short-term deprivation of liberty can provide a deterrent effect and whether it is permissible for a judge to decide on a fine as an alternative to short-term deprivation of liberty if there are no regulations governing it.

The research method used is normative research. The approach method used is the statutory approach method.

The results of this research indicate that short-term deprivation of liberty is less effective in providing a deterrent effect and in carrying out guidance appropriately. Therefore, carrying out guidance requires sufficient time so that the guidance methods and programs can be properly absorbed and in deciding a case the judge can decide criminal fines as an alternative to short-term deprivation of liberty even though there are no regulations governing it, because judges have independence from interference or intervention from any party, which is known as independent judicial power

Keywords: Criminal Fines, Short Term Deprivation of Liberty, Judicial Power